

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia adalah Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) juga tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (1) dan (2). Pemerintah Indonesia juga menggunakan cara penyelesaian konflik kebebasan beragama melalui mediasi, sehingga asas kesetaraan dan non diskriminasi dapat diterapkan kepada semua pihak.
2. Terjadinya konflik dalam kebebasan beragama disebabkan banyak masyarakat dan bahkan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan setingkat desa yang belum paham kebebasan beragama yang secara formal dijamin oleh berbagai macam peraturan termasuk didalam konstitusi negara Republik Indonesia, sehingga terciptanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok oknum

yang menganut paham ekstrimisme dan fanatisme untuk melakukan tindakan radikal.

B. Saran

1. Negara sebagai pembuat kebijakan baik di pusat dan di daerah harus memperhatikan nilai-nilai prinsip Hak Asasi Manusia disetiap regulasi/peraturan terutama yang masih mengandung unsur agama tertentu. Hal ini harus selaras dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam hal kebebasan beragama
2. Pemerintah sesegera mungkin untuk menarik peraturan yang masih mengandung unsur agama tertentu kemudian membuat peraturan yang sinkron terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dalam beragama dan menindak dengan tegas pelaku-pelaku yang menggunakan kekerasan beragama.
3. Pemerintah harus tegas melindungi dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1985, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agus Bustanuddin, 2006, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.Latief Wiyata, 2002, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LkiS, Yogyakarta.
- Al Khanif, 2010, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta.
- Ahmad Subakir dkk., 2010, *Potret Buram Kebebasan Beragama*, Nadi Press, Yogyakarta.
- A.W. Widjaja, 1985, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Era Swasta, Jakarta.
- Anat Scolnicov, 2011, *The Right to Religious Freedom in International Law Between Group Rights and Individual Rights*, New York: Routledge.
- Antonius, dkk, 2002. *Empowerment, Stress dan Konflik*, Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Andre Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bruggink, J.J.H, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Diterjemahkan B. Arief Sidharta, Citra Aditya, Bandung.
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta
- Bunjamin Maftuh, 2005, *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*, Disertasi (tidak diterbitkan) Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

- C. de Rover, 2000., *To Serve & To Protect*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dardji Darmadihardjo 1980, *Pendidikan Moral Pancasila*, Ditjen PDM Dep P dan K, Jakarta.
- Dean G.Pruitt, dan Jeffrey Z Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku Ihtiar, Jakarta.
- F. Isjwara, 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung.
- Frans Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaran Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Garry Goodpaster, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hidayat Komaruddin, 2011, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, Mizan, Bandung.
- Hesel Nogi S Tangkilisan,. 2003 *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*, Lukman Offset & Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Human Rights Watch, 2013, *Atas Nama Agama: pelanggaran terhadap minoritas agama di Indonesia*, United States of America.
- H.M. Amin Abdullah, 2011, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-Agama, dan Keindonesian*, Yogyakarta
- Inu Syafiie Kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
-, 2011, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
-, 1991, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Eresco dan Refika Aditama, Bandung.
- Irfan Islamy, 2009, *Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Joses Jimmy Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta.

Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, London.

Jimmly Asshiddiqie, 2005, *Konsitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

K.M Rhona Smith dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta .

L. Metcalf, and M.P. Hunt, 1996, *Ratio and Inquiry on Society's Closed Areas for Educating the Democratic Mind (Parker, W.)*, State University of New York Press, New York.

Maswadi Rauf, 2001, *Konsensus dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Mary Scannell, 2010, *The Big Book of Conflict Resolution Games*, United States of America: McGraw – Hill Companies, Inc.

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai hak ekonomi, sosial, budaya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muladi., 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat.*,Refika Aditama,Bandung.

M. G Endang Sumiarni, Sundari, E., 2010, *Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi pada situasi di Indonesia)*, Karya Putra Darwati, Bandung.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1980, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonessia*, FHUI, Jakarta.

M. Solly Lubis, 1978, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.

Nazmi Didi Yunus, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang.

Notohamidjojo., 1967, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo, Jakarta.

P.M. Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

P. Hotma Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga. Jakarta.

Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Sabthai Rosenne, 1984, *Practice and Methods Of Internasional Law*, Oceana Publications, London.

Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.

Suharno, 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, UNY Press. Yogyakarta.

Solichin Abdul Wahab, 2004, *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1999, *Sosiologi Suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S. Mamudji Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Thomas Santoso, 2001, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, Pustaka Utan Kayu Surabaya.

Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, Gramedia, Jakarta.

Toto Tasmara, 2002, *Membudidayakan Etos Kerja Islami*, Gema Insani Press, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eesco, Bandung.

Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta.

William N. Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Z. Zaiyardam, 2010, *Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan (Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau)*, Insistpress, Sleman.

Zakiyuddin Baidhawi, 2005, *Kredo Kebebasan Beragama*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119)

Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726)

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat Tahun 2006.

Jurnal/Makalah/Artikel

Wahid Institute, 2011, Makalah Laporan Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia.

Victor Silaen, 2011, Artikel Otonomi Daerah dan Perda-Perda Biasa Agama, Lab-ANE FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

Nella Sumika Putri, 2011, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Internet

(<http://fanziprasetia.blog.com/2011/03/18/hak-asasi-manusia-pasal/> diakses tanggal 8 Agustus 2014)

(<http://kbbi.web.id/agama> diakses tanggal 27 September 2014)

(<http://www.academia.edu/3643134/> diakses tanggal 19 Oktober 2013)

(<http://kbbi.web.id/konflik>, diakses tanggal 11 September 2014)

(<http://sistempemerintahanindonesia.com/> diakses tanggal 27 November 2015)

(<https://kemenag.go.id/file/dokumen/7LaporanUtama162.pdf>, diakses tanggal 8 febuari 2015)

(http://www.kompasiana.com/makenyok/apakahahmadiyahitudanmengapadianggapaliransesatolehumatmuslimumum_55007df4a333114e75510e90, diakses tanggal 4 mei 2017)

(http://www.kompasiana.com/relunghati/pembiaran-kekerasan-terhadap-ahmadiyah-sebagai-upaya-mendapat-dukungnan-politik_552c052a6ea834cb248b4567, diakses pada tanggal 4 mei 2017)

